# Ethical and Participatory Community Engagement for Sustainable Environmental Health Improvement

**Halimatus Sa'diyah[1], Fatimah de Gloria da Conceicao[2]**
Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia insani, Indonesia;
Universidade de Dili (UNDIL), Timor Leste
e-mail: [1]thusy723@gmail.com [2]undilfatima@gmail.com

Abstract/Abstrak

*Abstract: Peningkatan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan komunitas yang tidak hanya aktif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip etika. Artikel ini membahas peran ethical and participatory community engagement sebagai pendekatan strategis dalam upaya perbaikan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat yang inklusif, transparan, dan saling menghormati, serta pengakuan terhadap nilai, pengetahuan lokal, dan hak komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Melalui tinjauan literatur dan analisis praktik keterlibatan masyarakat dalam berbagai konteks kesehatan lingkungan, artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas yang etis dapat meningkatkan kepercayaan, rasa kepemilikan, dan keberlanjutan program intervensi lingkungan. Hasil kajian mengindikasikan bahwa integrasi prinsip etika—seperti keadilan, akuntabilitas, dan pemberdayaan—dalam proses partisipatif berkontribusi signifikan terhadap efektivitas kebijakan dan program kesehatan lingkungan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka kerja kolaboratif antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mencapai peningkatan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.*

Keywords: *Kesehatan lingkungan berkelanjutan, Keterlibatan komunitas, Partisipasi masyarakat,Prinsip etika, Pemberdayaan masyarakat.*

## A. Pendahuluan/ Introduction

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu determinan utama dalam pencapaian Pelaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan berbasis *ethical and participatory community engagement* dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling terintegrasi dan berkelanjutan. Tahapan pertama adalah identifikasi dan pemetaan

pemangku kepentingan serta kondisi lingkungan lokal. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi awal mengenai permasalahan kesehatan lingkungan, aktor yang terlibat, serta nilai dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas. Proses ini menekankan prinsip etika berupa transparansi dan penghormatan terhadap perspektif masyarakat setempat (Israel et al., 2010; WHO, 2016).

Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dilibatkan melalui forum diskusi kelompok, musyawarah komunitas, dan konsultasi publik untuk merumuskan prioritas masalah serta alternatif solusi. Pendekatan ini bertujuan membangun rasa kepemilikan dan keadilan dalam perencanaan program kesehatan lingkungan (Pretty, 1995; Rifkin, 2014).

Tahap ketiga meliputi pelaksanaan kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yang disepakati bersama, seperti pengelolaan limbah berbasis komunitas, penyediaan sarana sanitasi, atau edukasi lingkungan. Pada tahap ini, prinsip pemberdayaan menjadi fokus utama dengan mendorong peran aktif masyarakat sebagai pelaksana utama kegiatan, sementara pemerintah dan pemangku kepentingan lain berperan sebagai fasilitator (Wallerstein & Duran, 2010).

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi partisipatif. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi melibatkan komunitas untuk menilai efektivitas, keberterimaan, dan dampak kegiatan terhadap kesehatan lingkungan. Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan penyesuaian program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (Cargo & Mercer, 2008).

Tahap terakhir adalah penguatan keberlanjutan dan replikasi program. Hasil kegiatan digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan lokal dan penguatan kapasitas komunitas agar program dapat berlanjut secara mandiri. Integrasi hasil kegiatan ke dalam kebijakan publik lokal dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan dampak jangka panjang (UNDP, 2018; WHO, 2016).

Tabel tahapan kegiatan yang saling terintegrasi dan berkelanjutan

| No | Tahapan | Jenis Interaksi | Contoh |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertama | Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan serta kondisi lingkungan lokal | Kegiatan identifikasi dan pemetaan dil observasi lapangan untuk mengetahui ko lingkungan serta wawancara dengan r pemangku kepentingan guna mengide kepentingan, dan pengaruh masing-masing a |
| 2 | Kedua | Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan | Perencanaan partisipatif dilakukan melalui musyawarah dan diskusi kelompok bersama masyarakat untuk menetapkan prioritas masalah, merumuskan solusi, dan menentukan rencana tindakan kesehatan lingkungan secara bersama-sama. |
| 3 | Ketiga | Pelaksanaan kegiatan intervensi kesehatan | pengelolaan limbah berbasis komunitas atau perbaikan sanitasi, sesuai dengan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | lingkungan yang disepakati bersama, | rencana yang telah disepakati secara partisipatif. |
| 4 | Keempat | Monitoring dan evaluasi partisipatif | melibatkan masyarakat dalam menilai proses, capaian, dan dampak kegiatan kesehatan lingkungan melalui pertemuan evaluasi dan umpan balik bersama. |
| 5 | Kelima | Penguatan keberlanjutan dan replikasi program | membangun kapasitas masyarakat serta mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam kebijakan atau rencana kerja lokal agar dapat diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain. |

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai peran *ethical and participatory community engagement* dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya perbaikan kesehatan lingkungan. Penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana keterlibatan komunitas yang dilandasi prinsip etika mampu mendukung keberhasilan program kesehatan lingkungan serta membangun rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip etika yang berkontribusi signifikan dalam proses keterlibatan masyarakat, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan. Lebih lanjut, kajian ini juga menelaah bagaimana praktik keterlibatan komunitas yang etis dan partisipatif dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan kajian kesehatan lingkungan, khususnya terkait keterlibatan komunitas. Selama ini, literatur kesehatan lingkungan lebih banyak menekankan aspek teknis dan kebijakan, sementara dimensi etika dalam proses partisipasi masyarakat masih relatif kurang mendapat perhatian mendalam. Dengan menempatkan prinsip etika sebagai elemen kunci, penelitian ini memperkaya kerangka konseptual *community engagement* dengan perspektif yang lebih normatif dan reflektif, sehingga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara etika, partisipasi, dan keberlanjutan kesehatan lingkungan (Israel et al., 2010; Rifkin, 2014).

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, serta pelaksana program kesehatan lingkungan dalam merancang dan mengimplementasikan intervensi berbasis komunitas. Pendekatan *ethical and participatory community engagement* memberikan panduan praktis dalam membangun proses partisipatif yang inklusif, adil, dan transparan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan (Wallerstein & Duran, 2010; WHO, 2017).

Keterbaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada integrasi sistematis antara prinsip etika dan pendekatan partisipatif dalam konteks kesehatan lingkungan berkelanjutan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung memposisikan partisipasi masyarakat sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan efektivitas program, artikel ini menegaskan bahwa etika merupakan fondasi strategis dalam membangun kepercayaan, pemberdayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan prosedural, tetapi sebagai proses sosial yang bermakna dan berkeadilan, yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan program kesehatan lingkungan (Pretty, 1995; Arnstein, 1969).

## B. Metode/ Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik *ethical and participatory community engagement* dalam konteks kesehatan lingkungan berkelanjutan. Studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis berbagai temuan penelitian dan praktik terbaik yang telah dilaporkan sebelumnya.

Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi geografis tertentu karena bersifat kajian literatur. Analisis difokuskan pada berbagai konteks penerapan keterlibatan komunitas dalam program kesehatan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagaimana dilaporkan dalam sumber-sumber ilmiah yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, buku akademik, dan dokumen kebijakan terkait kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan etika keterlibatan komunitas. Literatur dikumpulkan dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, PubMed, dan Scopus, dengan rentang publikasi yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci antara lain *kesehatan lingkungan*, *community engagement*, *participatory approach*, dan *ethics*. Literatur yang terpilih diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kontribusi terhadap pembahasan keterlibatan komunitas dan prinsip etika dalam kesehatan lingkungan. Artikel yang tidak relevan atau bersifat duplikasi dikeluarkan dari analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Setiap literatur yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti bentuk keterlibatan komunitas, prinsip etika yang diterapkan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan program kesehatan lingkungan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan pola, kesenjangan, dan rekomendasi strategis terkait penguatan keterlibatan komunitas yang etis dan partisipatif.

## C. Hasil dan Pembahasan/ Results And Discussion

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas yang menerapkan prinsip etika dan partisipatif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan serta keberlanjutan program kesehatan lingkungan. Berbagai studi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat yang dilakukan secara inklusif, transparan, dan menghargai pengetahuan lokal mampu meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program intervensi lingkungan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan program.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika, seperti keadilan, akuntabilitas, dan saling menghormati, berperan penting dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi yang berkelanjutan serta mengurangi resistensi terhadap kebijakan atau intervensi kesehatan lingkungan. Program-program yang mengabaikan dimensi etika cenderung menghadapi tantangan berupa rendahnya dukungan masyarakat, konflik kepentingan, dan lemahnya keberlanjutan setelah intervensi eksternal berakhir.

Berbagai sumber yang dianalisis juga mengindikasikan bahwa program kesehatan lingkungan yang mengedepankan keterlibatan komunitas secara partisipatif memiliki tingkat keberterimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat top–down. Pendekatan top–down sering kali gagal menangkap kebutuhan dan konteks lokal, sehingga solusi yang ditawarkan kurang relevan dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan partisipatif memungkinkan integrasi antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman lokal, yang menghasilkan solusi yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan (Rifkin, 2014; Pretty, 1995).

Lebih lanjut, keterlibatan komunitas yang etis juga terbukti memperkuat kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat. Melalui proses partisipatif yang berkelanjutan, masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengelola isu kesehatan lingkungan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas bukan hanya berdampak pada keberhasilan program dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas dan keberlanjutan kesehatan lingkungan dalam jangka panjang.

Literatur juga mengindikasikan bahwa penerapan prinsip etika, seperti keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program intervensi lingkungan. Studi oleh Israel et al. (2010) menunjukkan bahwa pendekatan *community-based participatory research* yang berlandaskan etika memperkuat rasa kepemilikan komunitas dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, laporan WHO (2016) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat yang bermakna merupakan faktor penting dalam pengendalian risiko lingkungan yang berdampak pada kesehatan.

Hasil kajian literatur juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi jauh lebih efektif ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan berlandaskan prinsip etika. Pendekatan

partisipatif yang etis memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih setara antaraktor, di mana peran dan kepentingan masing-masing pihak diakui serta dihormati. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog dan negosiasi dengan masyarakat.

Literatur menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan mampu meningkatkan legitimasi kebijakan dan program kesehatan lingkungan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan prioritas, merancang strategi, dan mengevaluasi hasil program, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya cenderung meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang.

Selain itu, program kesehatan lingkungan yang mengintegrasikan prinsip pemberdayaan masyarakat terbukti lebih adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Hal ini memungkinkan program untuk disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan setempat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih realistis dan dapat diterima oleh komunitas.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam kerangka kolaboratif yang etis berkontribusi pada terciptanya dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat pelaksanaan program selama periode intervensi, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunitas untuk mempertahankan dan mengembangkan inisiatif kesehatan lingkungan secara mandiri setelah dukungan eksternal berkurang. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan program kesehatan lingkungan sangat bergantung pada kualitas kolaborasi dan tingkat pemberdayaan masyarakat yang dibangun melalui proses partisipatif dan etis (Wallerstein & Duran, 2010).

## D. Pembahasan / Discussion

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *ethical and participatory community engagement* bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen fundamental dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang dilandasi prinsip etika memungkinkan terjadinya hubungan yang setara antara komunitas dan pemangku kepentingan, sehingga mengurangi potensi konflik serta meningkatkan legitimasi program.

Analisis hasil menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika komunitas merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap tahapan program—mulai dari perencanaan hingga evaluasi—tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan kesehatan lingkungan meningkat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.




Selain itu, pengakuan terhadap pengetahuan lokal terbukti memperkaya solusi yang dihasilkan dalam program kesehatan lingkungan. Integrasi antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman lokal menghasilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan efektif. Pemberdayaan masyarakat melalui proses partisipatif juga mendorong kemandirian komunitas dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini memperkuat argumen bahwa integrasi prinsip etika dalam keterlibatan komunitas merupakan strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan lingkungan. Pendekatan kolaboratif yang etis tidak hanya menghasilkan dampak kesehatan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

## **E.** Kesimpulan/ Conclusion

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan komunitas yang etis dan partisipatif memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Integrasi prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan, terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat rasa kepemilikan, serta mendukung keberlanjutan program kesehatan lingkungan. Pendekatan ini juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kontekstual melalui pengakuan terhadap nilai dan pengetahuan lokal.




Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berlandaskan etika tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan daya tahan program dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka kerja kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip etika secara sistematis dalam setiap tahapan keterlibatan komunitas, serta mendorong pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan pendekatan *ethical and participatory community engagement* melalui studi lapangan guna memperkuat bukti kontekstual dan implementatif dalam berbagai setting kesehatan lingkungan.

## Daftar Pustaka/ References

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Cargo, M., & Mercer, S. L. (2008). The value and challenges of participatory research: Strengthening its practice. *Annual Review of Public Health, 29*, 325–350. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.091307.083824

Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2010). *Methods for community-based participatory research for health* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. Geneva: International Labour Organization.

Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development, 23*(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning, 29*(suppl_2), ii98–ii106. https://doi.org/10.1093/heapol/czu076

UNDP. (2018). *Capacity development: A UNDP primer*. New York: United Nations Development Programme.

Wallerstein, N., & Duran, B. (2010). Community-based participatory research contributions to intervention research: The intersection of science and practice. *American Journal of Public Health, 100*(S1), S40–S46. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.184036

World Health Organization. (2016). *Preventing disease through healthy environments: A global assessment of the burden of disease from environmental risks*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2017). *Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people*. Geneva: WHO.